

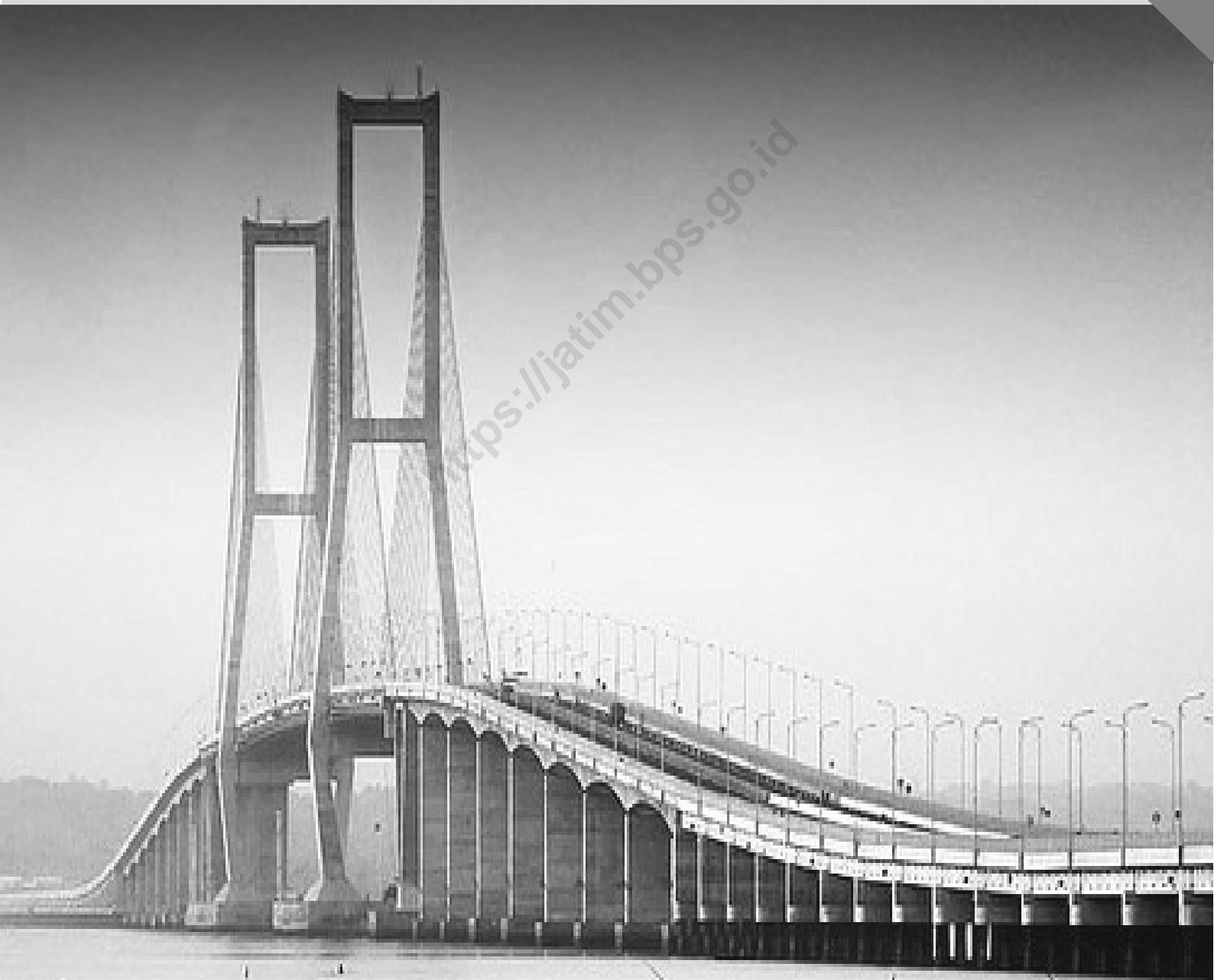
Katalog : 9302004.35

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2013–2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA TIMUR
MENURUT PENGELUARAN
2013—2017**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA TIMUR
MENURUT PENGELUARAN 2013- 2017**

ISBN : 978-602-6756-62-6

Nomor Publikasi : 35550.1803

Katalog : 9302004.35

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 78 halaman

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dicetak Oleh : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA TIMUR
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017**

Pengarah :

Teguh Pramono, MA

Penanggung Jawab :

Khaerul Agus, S.E, M.M

Penyunting dan Editor :

Kuswahyuniati, S.P, M.M

Dian Parwitasari, S.E, M.Si

Penulis dan Pengolah Data :

Aldizah Dajustia Hutami, SST

Desain Cover dan Tata Letak :

Aldizah Dajustia Hutami, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat kecepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, Juli 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Timur,



Teguh Pramono, M.A.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5 Perubahan Inventori	22
2.6 Ekspor Impor	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN JAWA TIMUR BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jawa Timur Menurut Pengeluaran	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	35
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRRT	39
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	40
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	43
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	44

3.7	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	45
3.8	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	47
3.9	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	49
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017	51
4.1	PDRB (Nominal)	53
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	54
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB.....	55
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	55
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	56
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	57
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	58
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	59
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	60
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	61
	PENUTUP	63
	LAMPIRAN	67
	DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	32
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	32
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	33
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	34
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	34
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	35
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	37
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	38
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	38
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	39
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	40
Tabel 12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	42
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	44
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	45

Tabel 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	46
Tabel 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	48
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	53
Tabel 18	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013-2017	54
Tabel 19	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017	55
Tabel 20	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	56
Tabel 21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013-2017	57
Tabel 22	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 ..	57
Tabel 23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	58
Tabel 24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017	59
Tabel 25	Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	60
Tabel 26	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017	33
----------	---	----

<https://jatim.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	69
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	70
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	71
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	72
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	73
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	74

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan tentunya akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN

SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Komponen ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan

- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni,

pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Komponen konsumsi pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-P Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-P Provinsi yang bersangkutan; c. PK-P Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-P Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar-penjualan barangdan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang

modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overall mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK, maka PMTB ADHB tersebut di-deflate (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-deflate PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara *ekstrapolasi* atau mengalikasikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB

ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di-*inflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengawasan (BP) Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK-nya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk

memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang,

pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara *men-deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;

- menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor.

Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://jatim.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN
JAWA TIMUR BERDASARKAN
PDRB MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2013-2017



Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur pada periode 2013 sampai dengan 2017 mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Jawa Timur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kelebihan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Jawa Timur akan diekspor ke daerah lain di luar Jawa Timur, sedangkan jika permintaan domestik tinggi sementara produksi domestik tidak mencukupi maka akan mendatangkan (impor) barang dan jasa dari daerah lain di luar Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB JAWA TIMUR MENURUT PENGELUARAN

Selama kurun waktu 2013–2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Timur berdasarkan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 2). Nilai PDRB ADHB yang pada umumnya lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

PDRB ADHB Jawa Timur tahun 2013 mencapai 1.382.504,50 Miliar Rupiah dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2017 mencapai 2.019.199,66 Miliar Rupiah. Peningkatan PDRB ADHB terjadi di seluruh komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori maupun ekspor impor.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013-2017**

<i>(Miliar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	866 916,17	949 343,44	1 019 622,14	1 108 459,19	1 194 165,05
2. Konsumsi LNPRRT	16 870,93	19 053,85	20 228,79	22 169,69	23 402,02
3. Konsumsi Pemerintah	93 232,47	96 944,24	104 912,33	104 345,29	112 896,17
4. PMTB	380 563,76	422 772,36	464 468,79	518 405,40	568 532,98
5. Perubahan Inventori	1 383,61	47 147,97	41 438,45	25 399,12	25 943,94
6. Ekspor Luar Negeri	228 013,85	243 721,82	246 890,09	272 783,01	284 943,73
7. Impor Luar Negeri	291 795,84	356 887,09	303 043,02	298 084,68	353 173,69
8. Net Ekspor Antar Daerah	87 316,55	115 851,03	96 959,48	104 120,66	162 489,45
Total PDRB	1 382 501,50	1 537 947,63	1 691 477,06	1 857 597,68	2 019 199,66

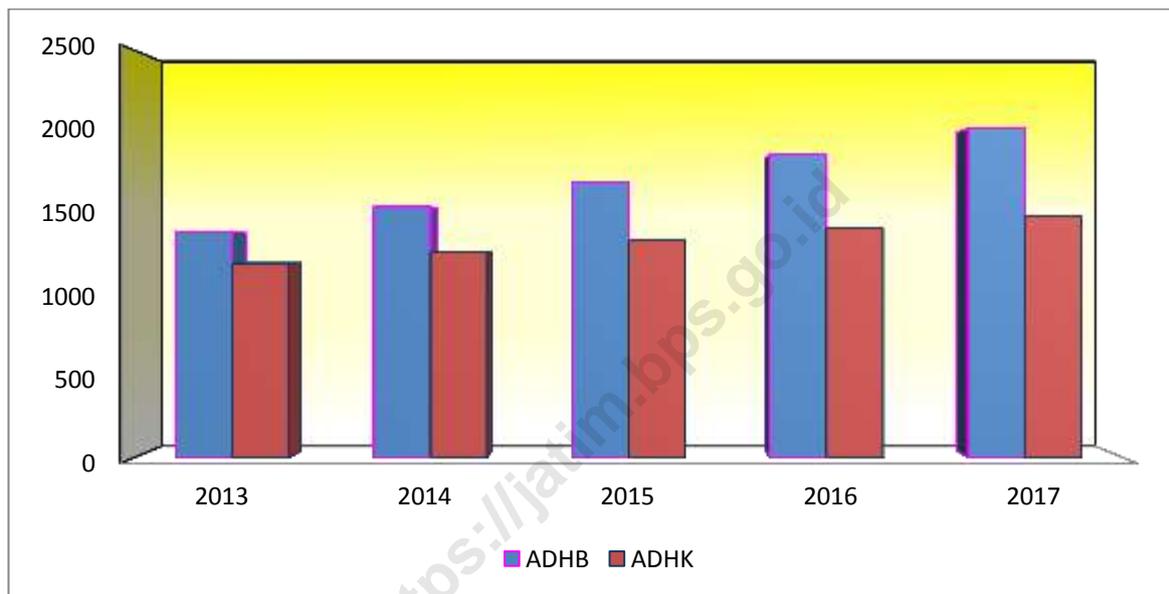
PDRB ADHK Jawa Timur selama kurun waktu 2013-2017 juga mengalami peningkatan. Tahun 2013, PDRB ADHK Jawa Timur mencapai 1.192.789,80 Miliar Rupiah. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2017 mencapai 1.482.147,59 Miliar Rupiah. Peningkatan PDRB ADHK tersebut terjadi seiring dengan semakin bertambahnya volume ekonomi Jawa Timur sebagai provinsi penopang Kawasan Indonesia Bagian Timur.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013-2017**

<i>(Miliar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	739 533,93	781 086,60	808 699,30	845 205,40	883 581,66
2. Konsumsi LNPRRT	11 980,87	13 574,97	13 419,21	14 206,30	14 540,18
3. Konsumsi Pemerintah	68 204,69	70 049,40	71 636,30	66 655,72	68 971,23
4. PMTB	330 280,83	344 715,56	364 831,01	386 846,00	410 312,66
5. Perubahan Inventori	1 232,04	35 268,13	30 384,49	17 664,44	18 024,04
6. Ekspor Luar Negeri	198 883,56	194 635,85	190 037,06	214 416,07	205 276,16
7. Impor Luar Negeri	236 351,95	269 540,31	240 955,46	241 000,49	270 374,65
8. Net Ekspor Antar Daerah	79 025,84	92 894,30	93 324,19	101 567,61	150 816,31
Total PDRB	1 192 789,80	1 262 684,50	1 331 376,10	1 405 561,04	1 482 147,59

Total PDRB atau terbentuknya keseluruhan PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

Gambar 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 - 2017



Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	62,71	61,73	60,28	59,67	59,14
2. Konsumsi LNPRT	1,22	1,24	1,20	1,19	1,16
3. Konsumsi Pemerintah	6,74	6,30	6,20	5,62	5,59
4. PMTB	27,53	27,49	27,46	27,91	28,16
5. Perubahan Inventori	0,10	3,07	2,45	1,37	1,28
6. Ekspor Luar Negeri	16,49	15,85	14,60	14,68	14,11
7. Impor Luar Negeri	21,11	23,21	17,92	16,05	17,49
8. Net Ekspor Antar Daerah	6,32	7,53	5,73	5,61	8,05
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,57	5,62	3,54	4,51	4,54
2. Konsumsi LNPRT	10,85	13,31	-1,15	5,87	2,35
3. Konsumsi Pemerintah	5,27	2,70	2,27	-6,95	3,47
4. PMTB	4,88	4,37	5,84	6,03	6,07
5. Perubahan Inventori	1 630,94	2 762,59	-13,85	-41,86	2,04
6. Ekspor Luar Negeri	2,13	-2,14	-2,36	12,83	-4,26
7. Impor Luar Negeri	6,46	14,04	-10,61	0,02	12,19
8. Net Ekspor Antar Daerah	17,60	17,55	0,46	8,83	49,47
Total PDRB	6,08	5,86	5,44	5,57	5,45

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari tahun 2013 s.d 2017 secara rata-rata mencapai 5,68 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,08 persen (2013); 5,86 persen (2014); 5,44 persen (2015); 5,57 persen (2016) dan 5,45 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,08 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar (5,44 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	117,22	121,54	126,08	131,15	135,15
2. Konsumsi LNPRT	140,82	140,36	150,75	156,06	160,95
3. Konsumsi Pemerintah	136,70	138,39	146,45	156,54	163,69
4. PMTB	115,22	122,64	127,31	134,01	138,56
5. Ekspor Luar Negeri	114,65	125,22	129,92	127,22	138,81
6. Impor Luar Negeri	123,46	132,41	125,77	123,69	130,62
7. Net Ekspor Antar Daerah	110,49	124,71	103,90	102,51	107,03
Total PDRB	115,90	121,80	127,05	132,16	136,23

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga secara struktur menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	866 916,17	949 343,44	1 019 622,14	1 108 459,19	1 194 165,05
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	739 533 93	781 086,60	808 699,30	845 205,40	883 581,66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	62,71	61,73	60,28	59,67	59,14
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	81 119,08	88 802,16	94 946,68	102 628,27	109 961,63
b. ADHK 2010	69 199,67	73 063,32	75 305,66	78 254,54	81 362,35
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	22 597,60	24 587,89	26 246,75	28 367,37	30 391,31
b. ADHK 2010	19 277,17	20 230,06	20 817,25	21 630,25	22 487,02
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	6,57	5,62	3,54	4,51	4,54
b. Per-RT	5,24	5,58	3,07	3,92	3,97
c. Perkapita	5,86	4,94	2,90	3,91	3,96
Jumlah RT (<i>unit</i>)	10 686 958	10 690 544	10 738 892	10 800 720	10 859 834
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	38 363,2	38 610,2	38 847 561	39 075 152	39 292 972

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 - 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

¹ Indeks perkembangan

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 s.d 2017 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 62,71 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 59,14 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Jawa Timur menghabiskan dana sekitar 81.119,08 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 88.802,16 ribu rupiah (2014); 94.946,68 ribu rupiah (2015); 102.628,27 ribu rupiah (2016); dan 109.961,63 ribu rupiah (2017).

Sementara itu, pada perkiraan ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 sampai 5 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,58 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Timur meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 2,90 s.d 4,94 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK meningkat dari 6,57 persen di tahun 2013 menjadi sebesar 5,62 persen (2014) dan melambat 3,54 persen pada 2015. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya menguat kembali menjadi 4,51 persen (2016) dan 4,54 persen (2017). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita selaras dengan ADHK dimana meningkat dari 5,24 persen pada tahun 2013 menjadi 5,58 persen (2014) dan melambat menjadi 3,07 persen (2015). Pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan konsumsi per-kapita mulai merangkak naik kembali menjadi 3,92 persen dan 3,97 persen. Nampak

bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,28	32,97	32,74	32,32	31,92
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,93	3,85	3,78	3,79	3,85
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11,13	11,01	10,91	10,89	10,85
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,13	6,90	7,33	7,36	7,45
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,84	23,87	23,91	23,98	24,26
f. Hotel dan Restoran	15,71	16,23	16,38	16,64	16,66
g. Lainnya	4,98	5,16	4,95	5,02	5,02
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Jawa Timur, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 34,28 persen (2013) ; 32,97 persen (2014) ; 32,74 persen (2015) ; 32,32 persen (2016); dan 31,92 persen (2017). Sementara proporsi pengeluaran bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga Jawa Timur yang tertinggi adalah sub komponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang berada pada kisaran 22 sampai 24 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,53	3,57	2,47	2,79	3,34
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,36	6,13	4,50	3,75	4,28
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	8,88	3,49	4,18	5,46	4,65
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,26	4,41	5,04	5,01	4,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,62	8,31	5,19	6,04	6,12
f. Hotel dan Restoran	7,21	7,47	2,85	4,76	4,41
g. Lainnya	6,34	6,90	0,27	4,94	4,43

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 7,62 persen (2013) ; 6,64 persen (2014) ; 4,05 persen (2015); 5,34 persen (2016); dan 5,10 persen (2017). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,40	1,70	4,07	4,40	2,97
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,08	1,00	0,87	5,06	5,02
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	2,73	4,74	2,16	2,87	2,51
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,96	1,55	8,65	3,94	4,24
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,96	5,68	2,26	2,82	2,69
f. Hotel dan Restoran	6,80	5,29	5,37	5,41	3,32
g. Lainnya	3,45	6,03	2,73	5,13	3,14

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi. Selama periode 2013 – 2017 peningkatan harga (inflasi) relatif stabil. Rincian peningkatan harga

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

pada kelompok makanan sebesar 3,40 persen (2013) ; 1,70 persen (2014) ; 4,07 persen (2015) ; 4,40 persen (2016); dan 2,97 persen (2017). Sementara itu, konsumsi bukan makanan dari 4,49 persen (2013) menjadi 4,73 persen (2014). Kemudian pada tahun berikutnya sebesar 3,58 persen (2015); 3,85 persen (2016); dan 3,10 persen (2017).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan peranan LNPRT dalam perekonomian yang dilihat dari proporsinya terhadap PDRB.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	16 870,93	19 053,85	20 228,79	22 169,69	23 402,02
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	11 980,87	13 574,97	13 419,21	14 206,30	14 540,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,22	1,24	1,20	1,19	1,16

Selama periode tahun 2013 - 2017 konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT ADHB sebesar 16.870,93 miliar rupiah (2013), 19.053,85 miliar rupiah (2014) meningkat menjadi 20.228,79 miliar rupiah (2015); 22.169,69 miliar rupiah (2016); dan 23.402,02 miliar rupiah (2017). Demikian juga dengan konsumsi LNPRT secara ADHK yaitu sebesar 11.980,87 miliar rupiah pada tahun 2013 dan selanjutnya meningkat hingga sebesar 14.540,18 miliar rupiah pada tahun 2017. Jika dilihat lebih lanjut proporsi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) relatif stabil selama periode 2013 - 2017 dan merupakan komponen yang paling kecil kontribusinya dalam penggunaan produk domestik regional bruto yaitu pada kisaran 1 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Secara umum pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 93.232,47 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 112.896,17 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	93 232,47	96 944,24	104 912,33	104 345,29	112 896,17
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	68 204,69	70 049,40	71 636,30	66 655,72	68 971,23
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	6,74	6,30	6,20	5,62	5,59
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	2 430,26	2 510,85	2 700,62	2 670,37	2 873,19
b. ADHK 2010	1 777,87	1 814,27	1 844,04	1 705,83	1 755,31
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	190 551,91	200 768,42	221 124,11	223 900,60	257 552,12
b. ADHK 2010	139 399,21	145 070,05	150 988,10	143 027,60	157 345,34
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	5,27	2,70	2,27	-6,95	3,47
b. Konsumsi perkapita	5,66	2,05	1,64	-7,49	2,90
c. Konsumsi per-pegawai	2,58	4,07	4,08	-5,27	10,01
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	489 276	482 866	474 450	466 034	438 343
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	38 363,2	38 610,2	38 847,6	39 075,1	39 293,0

Distribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB Total mengalami penurunan dari 6,74 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 5,59 persen pada tahun 2017. Sepanjang periode tersebut, proporsinya terus mengalami penurunan. Penurunan proporsi konsumsi pemerintah terjadi baik pada konsumsi kolektif maupun konsumsi individu.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita ADHB sebesar 2 430,26 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADHK 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11) walaupun cenderung melambat. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 5,66 persen pada 2013 dan menjadi sebesar 2,90 persen pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 190.551,91 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 10,01 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan pola yang berfluktuasi (baik ADHB maupun ADHK 2010). Selama periode tahun 2013 s.d 2017 jumlah pegawai pemerintah mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 489.276 orang dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 438.343 orang. Selama periode 2013-2017 terjadi pengurangan jumlah PNS sebanyak 50.933 orang atau sekitar 10,41 persen dibandingkan tahun 2013. Penurunan tersebut ditengarai akibat kebijakan pemerintah dalam moratorium PNS guna efisiensi baik dari sisi sumber daya manusianya maupun anggaran, sehingga belanja pemerintah dapat fokus untuk pelayanan masyarakat.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 2,90 persen sedangkan untuk

konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 10,01 persen.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah ⁷					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	47 541,38	49 557,71	51 151,37	51 934,68	56 890,98
(%)	50,99	51,12	48,76	49,77	50,39
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	45 691,09	47 386,53	53 760,96	52 410,62	56 005,19
(%)	49,01	48,88	51,24	50,23	49,61
Total Konsumsi (Miliar Rp)	93 232,47	96 944,24	104 912,33	104 345,29	112 896,17
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	5,73	3,62	-2,16	-7,27	3,44
b. Konsumsi Individu	4,70	1,56	7,94	-6,58	3,51
Total Konsumsi	5,27	2,70	2,27	-6,95	3,47
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁸					
a. Konsumsi Kolektif	1,63	0,60	5,50	9,49	5,90
b. Konsumsi Individu	4,03	2,12	5,10	4,36	3,24
Total Konsumsi	2,75	1,24	5,82	6,89	4,56

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar lebih dari 50 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 proporsinya mencapai 50,99 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 51,12 persen. Selanjutnya proporsi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 yakni menjadi sebesar 48,76 persen dan 49,77 persen. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 50,39 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ketahun (lihat tabel 12). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2013-2017 juga cenderung meningkat. Pada tahun 2013 konsumsi individu proporsinya sebesar 49,01 persen dan meningkat hingga pada tahun 2017 sebesar 49,61 persen.

⁷Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan secara gradual dari yang sebesar 489 276 orang (2013) menjadi 438.343 orang (2017). Sedangkan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari sejumlah 38.363,2 ribu orang pada tahun 2013 menjadi 39.293,0 ribu orang pada tahun 2017. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dengan masing-masing adalah 78,41 (2013), 79,96 (2014), 81,88 (2015), 83,85 (2016), dan 89,64 (2017). Hal ini berarti pada tahun 2017 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 89 penduduk.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2013 – 2017 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB. Proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB relatif stabil sekitar 78-79 persen selama periode tahun 2013 – 2017.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan menunjukkan pola yang variatif antar tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan sub komponen bangunan sebesar 6,09 persen kemudian melambat pada tahun 2014 menjadi 4,61 persen dan kembali menguat sampai dengan tahun 2017 yakni sebesar 6,08 persen

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

(2015); 6,55 persen (2016); dan 6,23 persen (2017). Sedangkan Non Bangunan cenderung meningkat dari 0,92 persen tahun 2013 menjadi 3,54 persen (2014); 5,00 persen (2015); 4,25 persen (2016) dan 5,50 persen (2017).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	380 563,76	422 772,36	464 468,79	518 405,40	568 532,98
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	330 280,83	344 715,56	364 831,01	386 846,00	410 312,66
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	27,53	27,49	27,46	27,91	28,16
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	297 330,73	332 881,82	365 746,18	413 606,77	453 312,04
(%)	(78,13)	(78,74)	78,75	79,78	79,73
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>)	83 233,02	89 890,53	98 722,60	104 798,62	115 220,94
(%)	(21,87)	(21,26)	21,25	20,22	20,27
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	380 563,76	422 772,36	464 468,79	518 405,40	568 532,98
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	6,09	4,61	6,08	6,55	6,23
b. Non Bangunan	0,92	3,54	5,00	4,25	5,50
Total PMTB	4,88	4,37	5,84	6,03	6,07

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2013-2017 pertumbuhan PMTB cenderung mengalami peningkatan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai besaran angka 6,07 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 4,37 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping

¹⁰Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada akhir tahun dikurangi persediaan barang pada awal tahun.

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 383,61	47 147,97	41 438,45	25 399,12	25 943,94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 232,04	35 268,13	30 384,49	17 664,44	18 025,04
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,10	3,07	2,45	1,37	1,28

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2013 perubahan inventori sebesar 1 383,61 miliar rupiah, kemudian tahun 2014 perubahan inventori nilainya sebesar 47.147,97 miliar rupiah. Perubahan inventori pada tahun 2015 sebesar 41.438,45 miliar rupiah, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi sebesar 25.399,12 miliar rupiah dan 25.943,94 miliar rupiah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Transaksi ekspor dalam struktur permintaan akhir menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013–2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	228 013,85	243 721,82	246 890,09	272 783,01	284 943,73
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	198 883,56	194 635,85	190 037,06	214 416,07	205 276,16
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	16,49	15,85	14,60	14,68	14,11
Struktur Ekspor ¹²					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	217 891,54	232 604,82	236 284,36	261 181,37	271 055,59
(%)	95,56	95,48	95,70	95,75	95,13
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	10 122,31	11 116,99	10 605,74	11 601,64	13 888,14
(%)	4,44	4,52	4,30	4,25	4,87
Total ekspor	228 013,85	243 721,82	246 890,09	272 783,01	284 943,73
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹³					
- Barang	2,13	-2,09	-2,19	13,17	-4,83
- Jasa	2,21	-3,16	-6,27	4,64	10,61
Total ekspor	2,13	-2,14	-2,36	12,83	-4,26

Nilai ekspor tahun 2013-2017 secara total menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 nilai ekspor luar negeri Jawa Timur mencapai 212.739,29 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 nilai ekspornya mencapai 284.943,73 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor ADHB, nilai ekspor ADHK 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 198.883,56 miliar rupiah (2013); 194.635,85 miliar rupiah (2014); 190.037,06 miliar rupiah (2015); 214.416,07 miliar rupiah (2016) dan 205.276,16 miliar rupiah (2017). Nilai ekspor luar negeri ADHB dan ADHK 2010 yang cenderung meningkat tiap tahun tersebut, ternyata tidak selalu sejalan dengan proporsi ekspor terhadap total PDRB. Proporsi ekspor luar negeri Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dari 16,49 persen pada tahun 2013 menjadi 14,11 persen pada tahun 2017.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Jawa Timur berupa barang (rata-rata diatas 90 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Pada tahun 2013 ekspor luar negeri tumbuh sebesar 2,13 persen. Kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 2,14 persen dan 2,36 persen. Terkontraksinya komponen ekspor luar negeri terjadi akibat dari turunnya ekspor beberapa komoditas baik barang maupun

¹²Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

jasa pada tahun tersebut. Diduga melemahnya permintaan barang ekspor luar negeri sebagai dampak dari lesunya ekonomi global saat itu. Ekspor luar negeri sempat melesit kembali pada tahun 2016 yakni sebesar 12,83 persen, namun kemudian mengalami kontraksi kembali di tahun 2017 sebesar 4,26 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Jawa Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Jawa Timur terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Jawa Timur di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 16 di bawah menunjukkan pola perkembangan impor Jawa Timur pada periode tahun 2013 s.d 2017 cukup berfluktuatif namun cenderung meningkat (baik ADHB maupun ADHK 2010). Atas dasar harga berlaku, nilai impor luar negeri tahun 2013 mencapai 291.795,84 miliar rupiah dan meningkat pada tahun 2014 yakni mencapai 356.887,09 miliar rupiah. Impor luar negeri sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dengan nilai mencapai 303.043,02 miliar rupiah (2015) dan 298.084,68 miliar rupiah (2016), namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dengan nilai impor mencapai 353.173,69 miliar rupiah.

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	291 795,84	356 887,09	303 043,02	298 084,68	353 173,69
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	236 351,95	269 540,31	240 955,46	241 000,49	270 374,65
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	21,11	23,21	17,92	16,05	17,49
Struktur Impor ¹⁴					
a. Barang (<i>Mil Rp</i>)	269 622,60	327 005,25	281 193,73	270 367,72	323 731,07
(%)	92,40	91,63	92,79	90,70	91,66
b. Jasa (<i>Mil Rp</i>)	22 173,24	29 881,83	21 849,29	27 716,96	29 442,62
(%)	7,60	8,37	7,21	9,30	8,34
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁵					
- Barang					
- Jasa	6,29	13,79	-9,16	-1,50	13,08
Total impor	8,64	17,09	-27,83	22,68	1,53
	6,46	14,04	-10,61	0,02	12,19

Proporsi impor LN terhadap total PDRB selama periode 2013 - 2017 juga bervariasi dengan rentang antara 16 persen sampai 23 persen. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 23,21 persen dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 16,05 persen.

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2014 sebesar 14,04 persen dan tahun 2017 sebesar 12,19 persen. Namun demikian, kinerja impor luar negeri Jawa Timur juga sempat mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2015 sebesar 10,61 persen. Kinerja perdagangan internasional Jawa Timur baik ekspor maupun impor tidak luput dari kondisi ekonomi global. Kondisi global yang mengalami stagnan ataupun kelesuhan akan menyebabkan gairah ekspor impor Jawa Timur khususnya dan Indonesia secara umum juga ikut menurun, begitu juga sebaliknya.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki proporsi sekitar 90-92 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Selama periode 2013 - 2017, impor LN dalam bentuk barang cenderung mengalami penurunan. Namun impor LN jasa mempunyai pola struktur yang agak berbeda dengan impor barang, yaitu cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 porsi impor jasa hanya sebesar 7,60 persen, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,34 persen.

¹⁴Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2000)

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam *series* PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT

PDRB MENURUT PENGELUARAN

PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2013-2017



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat .Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	1 382 501,50	1 537 947,63	1 691 477,06	1 857 597,68	2 019 199,66
- ADHK 2010	1 192 789,80	1 262 684,50	1 331 376,10	1 405 561,04	1 482 147,59
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	36 037,18	39 832,68	43 541,40	47 539,10	51 388,32
- ADHK 2010	31 092,04	32 703,39	34 271,81	35 970,71	37 720,42
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	5,37	5,18	4,80	4,96	4,86
Jumlah penduduk (000 org)					
Pertumbuhan	0,67	0,64	0,61	0,59	0,56

Tabel 17 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu

menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,6 - 0,7 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang di ekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Jawa Timur (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Timur sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	866 916,17	949 343,44	1 019 622,14	1 108 459,19	1 194 165,05
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	569 273,53	674 263,83	696 222,74	812 248,19	973 074,44
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,52	1,41	1,46	1,36	1,23

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 1,52 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2013 - 2017, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan kecenderungan menurun. Secara implisit data tersebut menjelaskan, walaupun nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor semakin meningkat

namun peningkatan nilai ekspor jauh lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	866 916,17	949 343,44	1 019 622,14	1 108 459,19	1 194 165,05
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	380 563,76	422 772,36	464 468,79	518 405,40	568 532,98
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,28	2,25	2,20	2,14	2,10

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun. Pada tahun 2013 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 2,28 menurun menjadi 2,25 pada tahun 2014; 2,20 (2015), 2,14 (2016) dan 2,10 (2017). Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah.

Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
<i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah tangga	866 916,17	949 343,44	1 019 622,14	1 108 459,19	1 194 165,05
b. LNPRT	16 870,93	19 053,85	20 228,79	22 169,69	23 402,02
c. Pemerintah	93 232,47	96 944,24	104 912,33	104 345,29	112 896,17
J u m l a h	977 019,57	1 065 341,54	1 144 763,27	1 234 974,18	1 330 463,24
PDRB (ADHB)					
<i>(Miliar Rp)</i>					
	1 382 501,50	1 537 947,63	1 691 477,06	1 857 597,68	2 019 199,66
Proporsi	70,67	69,27	67,68	66,48	65,89

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang di ekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang di ekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	569 273,53	674 263,83	696 222,74	812 248,19	973 074,44
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	380 563,76	422 772,36	464 468,79	518 405,40	568 532,98
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,50	1,59	1,50	1,57	1,71

Selama tahun 2013-2017, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB dan rasio ekspor terhadap PMTB juga mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1 382 501,50	1 537 947,63	1 691 477,06	1 857 597,68	2 019 199,66
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	545 738,97	671 578,06	655 416,18	733 429,21	878 814,94
Rasio PDRB terhadap Impor	2,53	2,29	2,58	2,53	2,30

Tabel 22 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2013 - 2017 cenderung menurun dari sebesar 2,53 pada tahun 2013 menjadi 2,29 pada tahun 2014. Pada tahun berikutnya rasio PDRB terhadap impor mengalami peningkatan menjadi 2,58 (2015), 2,53 (2016) dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar 2,30. Penurunan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin meningkat.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	1 382 501,50	1 537 947,63	1 691 477,06	1 857 597,68	2 019 199,66
%	(71,70)	(69,61)	(72,07)	(71,69)	(69,68)
Total nilai Impor ADHB					
(Miliar Rp)	545 738,97	671 578,06	655 416,18	733 429,21	878 814,94
%	(28,30)	(30,39)	(27,93)	(28,31)	(30,32)
<u>Total Permintaan</u>					
Akhir ¹⁶ (Miliar Rp)	1 928 240,47	2 209 525,69	2 346 893,24	2 591 026,88	2 898 014,60
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 27 s.d 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 1.928.240,47 miliar (2013) menjadi sebesar 2.898.014,60 miliar rupiah (2017).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.382.501,50 miliar rupiah (2013); 1.537.947,63 miliar rupiah (2014); 1.691.477,06 miliar rupiah (2015); 1.857.597,68 miliar rupiah (2016) dan

¹⁶ Termasuk diskrepansi statistik

2.019.199,66 miliar rupiah (2017). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 545.738,97 miliar rupiah (2013); 671.578,06 miliar rupiah (2014); 655.416,18 miliar rupiah (2015); 733.429,21 miliar rupiah (2016) dan 878.814,94 miliar rupiah (2017).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	569 273,53	674 263,83	696 222,74	812 248,19	973 074,44
Nilai Impor (ADHB)(Miliar Rp)	545 738,97	671 578,06	655 416,18	733 429,21	878 814,94
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	23 534,56	2 685,77	40 806,56	78 818,98	94 259,49
Rasio ekspor thdp Impor	1,04	1,00	1,06	1,11	1,11

Selama periode 2013 - 2017, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Timur dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Timur cenderung dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Selama tahun 2013-2017 terjadi surplus perdagangan Provinsi Jawa Timur yang masing-masing tercatat sebesar 23.534,56 miliar rupiah (2013), 2.685,77 miliar rupiah (2014), 40.806,56 miliar rupiah (2015), 78.818,98 miliar rupiah (2016) dan meningkat menjadi 94.259,49 miliar rupiah (2017).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 rasionya sebesar 1,04; menurun menjadi 1,00 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,06 pada tahun 2016, dan pada tahun 2016-2017 sebesar 1,11.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	228 013,85	243 721,82	246 890,09	272 783,01	284 943,73
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	291 795,84	356 887,09	303 043,02	298 084,68	353 173,69
(X - M) (Miliar Rp)	-63 781,99	-113 165,27	-56 152,92	-25 301,68	-68 229,96
(X + M) (Miliar Rp)	519 809,69	600 608,91	549 933,11	570 867,69	638 117,43
RPI	-0,12	-0,19	-0,10	-0,04	-0,11

Data pada tabel 25 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2013-2017 posisi ekspor lebih rendah dari impor. Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut terus

meningkat dari 228.013,85 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 284.943,73 miliar rupiah pada tahun 2017. Begitu pula dengan kecenderungan impor, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor, cenderung meningkat setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2017 rasio perdagangan internasionalnya didominasi oleh impor karena rasio yang menunjukkan tanda minus.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio,
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1 192 789,80	1 262 684,50	1 331 376,10	1 405 561,04	1 482 147,59
Perubahan (miliar rupiah)	68 325,16	69 894,69	68 691,60	74 184,94	76 586,54
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	330 280,83	344 715,56	364 831,01	386 846,00	410 312,66
ICOR	4,83	4,93	5,31	5,21	5,36

Data di atas menunjukkan besaran ICOR meningkat dari sebesar 4,83 (2013) menjadi 4,93 (2014). Pada tahun 2015 ICOR meningkat menjadi 5,31, melambat pada tahun 2016 sebesar 5,21 dan kemudian naik kembali sebesar 5,36 pada tahun 2017.

BAB V

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Timur terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN



**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	866 916,17	949 343,44	1 019 622,14	1 108 459,19	1 194 165,05
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	297 210,13	313 041,22	333 824,45	358 243,74	381 192,22
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	34 072,99	36 523,01	38 498,33	41 966,26	45 957,85
1.c. Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	96 452,54	104 558,75	111 284,95	120 738,73	129 520,29
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	61 794,83	65 524,70	74 777,48	81 618,76	88 945,11
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	197 984,01	226 611,03	243 778,48	265 798,08	289 653,29
1.f. Hotel dan Restoran	136 197,23	154 115,59	167 017,87	184 447,83	198 960,68
1.g. Lainnya	43 204,45	48 969,14	50 440,59	55 645,80	59 935,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	16 870,93	19 053,85	20 228,79	22 169,69	23 402,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	93 232,47	96 944,24	104 912,33	104 345,29	112 896,17
3.a. Konsumsi Kolektif	47 541,38	49 557,71	51 151,37	51 934,68	56 890,98
3.b. Konsumsi Individu	45 691,09	47 386,53	53 760,96	52 410,62	56 005,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	380 563,76	422 772,36	464 468,79	518 405,40	568 532,98
4.a. Bangunan	297 330,73	332 881,82	365 746,18	413 606,77	453 312,04
4.b. Non-Bangunan	83 233,02	89 890,53	98 722,60	104 798,62	115 220,94
5. Perubahan Inventori	1 383,61	47 147,97	41 438,45	25 399,12	25 943,94
6. Ekspor Luar Negeri	228 013,85	243 721,82	246 890,09	272 783,01	284 943,73
6.a. Barang	217 891,54	232 604,82	236 284,36	261 181,37	271 055,59
6.b. Jasa	10 122,31	11 116,99	10 605,74	11 601,64	13 888,14
7. Impor Luar Negeri	291 795,84	356 887,09	303 043,02	298 084,68	353 173,69
7.a. Barang	269 622,60	327 005,25	281 193,73	270 367,72	323 731,07
7.b. Jasa	22 173,24	29 881,83	21 849,29	27 716,96	29 442,62
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	87 316,55	115 851,03	96 959,48	104 120,66	162 489,45
8.a. Ekspor	341 259,68	430 542,01	449 332,64	539 465,18	688 130,70
8.b. Impor	253 943,13	314 690,97	352 373,16	435 344,52	525 641,25
PDRB	1 382 501,50	1 537 947,63	1 691 477,06	1 857 597,68	2 019 199,66

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	739 533,93	781 086,60	808 699,30	845 205,40	883 581,66
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	246 672,68	255 479,80	261 794,50	269 103,54	278 082,75
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	28 841,51	30 609,80	31 987,67	33 188,17	34 607,78
1.c. Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	86 459,34	89 480,67	93 220,70	98 313,62	102 885,35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	49 918,85	52 121,78	54 747,63	57 489,04	60 102,45
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	179 639,21	194 561,23	204 666,66	217 025,88	230 313,74
1.f. Hotel dan Restoran	108 822,49	116 950,60	120 287,46	126 018,02	131 570,78
1.g. Lainnya	39 179,84	41 882,72	41 994,66	44 067,12	46 018,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11 980,87	13 574,97	13 419,21	14 206,30	14 540,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	68 204,69	70 049,40	71 636,30	66 655,72	68 971,23
3.a. Konsumsi Kolektif	37 969,46	39 343,61	38 491,85	35 693,41	36 922,93
3.b. Konsumsi Individu	30 235,23	30 705,78	33 144,45	30 962,32	32 048,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	330 280,83	344 715,56	364 831,01	386 846,00	410 312,66
4.a. Bangunan	255 495,15	267 280,28	283 521,25	302 081,90	320 888,68
4.b. Non-Bangunan	74 785,67	77 435,28	81 309,76	84 764,10	89 423,98
5. Perubahan Inventori	1 232,04	35 268,13	30 384,49	17 664,44	18 024,04
6. Ekspor Luar Negeri	198 883,56	194 635,85	190 037,06	214 416,07	205 276,16
6.a. Barang	190 568,99	186 583,96	182 489,86	206 519,05	196 541,53
6.b. Jasa	8 314,57	8 051,88	7 547,20	7 897,02	8 734,63
7. Impor Luar Negeri	236 351,95	269 540,31	240 955,46	241 000,49	270 374,65
7.a. Barang	218 477,09	248 611,05	225 850,05	222 469,84	251 560,25
7.b. Jasa	17 874,86	20 929,25	15 105,41	18 530,64	18 814,40
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	79 025,84	92 894,30	93 324,19	101 567,61	151 816,31
8.a. Ekspor	317 098,11	380 823,46	402 441,17	455 790,54	550 694,89
8.b. Impor	238 072,28	287 929,16	309 116,99	354 222,93	398 878,58
PDRB	1 192 789,80	1 262 684,50	1 331 376,10	1 405 561,04	1 482 147,59

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,71	61,73	60,28	59,67	59,14
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	21,50	20,35	19,74	19,29	18,88
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,46	2,37	2,28	2,26	2,28
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,98	6,80	6,58	6,50	6,41
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,47	4,26	4,42	4,39	4,40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,32	14,73	14,41	14,31	14,34
1.f. Hotel dan Restoran	9,85	10,02	9,87	9,93	9,85
1.g. Lainnya	3,13	3,18	2,98	3,00	2,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,22	1,24	1,20	1,19	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,74	6,30	6,20	5,62	5,59
3.a. Konsumsi Kolektif	3,44	3,22	3,02	2,80	2,82
3.b. Konsumsi Individu	3,30	3,08	3,18	2,82	2,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,53	27,49	27,46	27,91	28,16
4.a. Bangunan	21,51	21,64	21,62	22,27	22,45
4.b. Non-Bangunan	6,02	5,84	5,84	5,64	5,71
5. Perubahan Inventori	0,10	3,07	2,45	1,37	1,28
6. Ekspor Luar Negeri	16,49	15,85	14,60	14,68	14,11
6.a. Barang	15,76	15,12	13,97	14,06	13,42
6.b. Jasa	0,73	0,72	0,63	0,62	0,69
7. Impor Luar Negeri	21,11	23,21	17,92	16,05	17,49
7.a. Barang	19,50	21,26	16,62	14,55	16,03
7.b. Jasa	1,60	1,94	1,29	1,49	1,46
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	6,32	7,53	5,73	5,61	8,05
8.a. Ekspor	24,68	27,99	26,56	29,04	34,08
8.b. Impor	18,37	20,46	20,83	23,44	26,03
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,57	5,62	3,54	4,51	4,54
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,53	3,57	2,47	2,79	3,34
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,36	6,13	4,50	3,75	4,28
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,88	3,49	4,18	5,46	4,65
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,26	4,41	5,04	5,01	4,55
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,62	8,31	5,19	6,04	6,12
1.f. Hotel dan Restoran	7,21	7,47	2,85	4,76	4,41
1.g. Lainnya	6,34	6,90	0,27	4,94	4,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,85	13,31	- 1,15	5,87	2,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,27	2,70	2,27	- 6,95	3,47
3.a. Konsumsi Kolektif	5,73	3,62	- 2,16	- 7,27	3,44
3.b. Konsumsi Individu	4,70	1,56	7,94	- 6,58	3,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,88	4,37	5,84	6,03	6,07
4.a. Bangunan	6,09	4,61	6,08	6,55	6,23
4.b. Non-Bangunan	0,92	3,54	5,00	4,25	5,50
5. Perubahan Inventori	1 630,94	2 762,59	- 13,85	- 41,86	2,04
6. Ekspor Luar Negeri	2,13	- 2,14	- 2,36	12,83	- 4,26
6.a. Barang	2,13	- 2,09	- 2,19	13,17	- 4,83
6.b. Jasa	2,21	- 3,16	- 6,27	4,64	10,61
7. Impor Luar Negeri	6,46	14,04	- 10,61	0,02	12,19
7.a. Barang	6,29	13,79	- 9,16	- 1,50	13,08
7.b. Jasa	8,64	17,09	- 27,83	22,68	1,53
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	17,60	17,55	0,46	8,83	49,47
8.a. Ekspor	10,05	20,10	5,68	13,26	20,82
8.b. Impor	7,76	20,94	7,36	14,59	12,61
PDRB	6,08	5,86	5,44	5,57	5,45

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	117,22	121,54	126,08	131,15	135,15
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	120,49	122,53	127,51	133,12	137,08
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	118,14	119,32	120,35	126,45	132,80
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	111,56	116,85	119,38	122,81	125,89
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	123,79	125,71	136,59	141,97	147,99
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	110,21	116,47	119,11	122,47	125,76
1.f. Hotel dan Restoran	125,16	131,78	138,85	146,37	151,22
1.g. Lainnya	110,27	116,92	120,11	126,28	130,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	140,82	140,36	150,75	156,06	160,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	136,70	138,39	146,45	156,54	163,69
3.a. Konsumsi Kolektif	125,21	125,96	132,89	145,50	154,08
3.b. Konsumsi Individu	151,12	154,32	162,20	169,27	174,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	115,22	122,64	127,31	134,01	138,56
4.a. Bangunan	116,37	124,54	129,00	136,92	141,27
4.b. Non-Bangunan	111,30	116,08	121,42	123,64	128,85
5. Perubahan Inventori	112,30	133,68	136,38	143,79	143,94
6. Ekspor Luar Negeri	114,65	125,22	129,92	127,22	138,81
6.a. Barang	114,34	124,66	129,48	126,47	137,91
6.b. Jasa	121,74	138,07	140,53	146,91	159,00
7. Impor Luar Negeri	123,46	132,41	125,77	123,69	130,62
7.a. Barang	123,41	131,53	124,50	121,53	128,69
7.b. Jasa	124,05	142,78	144,65	149,57	156,49
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	110,49	124,71	103,90	102,51	107,03
8.a. Ekspor	107,62	113,06	111,65	118,36	124,96
8.b. Impor	106,67	109,29	113,99	122,90	131,78
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	115,90	121,80	127,05	132,16	136,23

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Timur**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,08	3,68	3,74	4,02	3,05
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,40	1,70	4,07	4,40	2,97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,08	1,00	0,87	5,06	5,02
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,73	4,74	2,16	2,87	2,51
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,96	1,55	8,65	3,94	4,24
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,96	5,68	2,26	2,82	2,69
1.f. Hotel dan Restoran	6,80	5,29	5,37	5,41	3,32
1.g. Lainnya	3,45	6,03	2,73	5,13	3,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,40	-0,32	7,40	3,52	3,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,75	1,24	5,82	6,89	4,56
3.a. Konsumsi Kolektif	1,63	0,60	5,50	9,49	5,90
3.b. Konsumsi Individu	4,03	2,12	5,10	4,36	3,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,24	6,44	3,81	5,26	3,40
4.a. Bangunan	3,99	7,02	3,58	6,14	3,18
4.b. Non-Bangunan	9,50	4,30	4,59	1,83	4,22
5. Perubahan Inventori	2,66	19,04	2,02	5,43	0,11
6. Ekspor Luar Negeri	4,94	9,22	3,75	-2,07	9,11
6.a. Barang	4,65	9,03	3,86	-2,32	9,05
6.b. Jasa	11,54	13,41	1,78	4,54	8,23
7. Impor Luar Negeri	7,95	7,25	-5,01	-1,65	5,61
7.a. Barang	7,52	6,58	-5,34	-2,39	5,89
7.b. Jasa	13,65	15,10	1,31	3,41	4,62
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	17,47	12,87	-16,69	-1,33	4,41
8.a. Ekspor	2,85	5,05	-1,24	6,01	5,58
8.b. Impor	-1,10	2,46	4,30	7,81	7,22
PDRB	4,37	5,09	4,31	4,02	3,08

DAFTAR PUSTAKA



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. , *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Jawa Timur Dalam Angka*, berbagai seri, Surabaya.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Proyeksi Penduduk 2010-2035*, berbagai seri, Jakarta
6. , *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
7. _____, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, berbagai seri, Surabaya.
8. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
12. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
13. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
14. *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
15. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
16. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.

17. Keuning, J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
18. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
19. , *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
20. , *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
21. , *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
22. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
23. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
24. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
25. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jatim.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43-44, Surabaya
Telp. (031) 843934. Fax: (031) 8494007.
Homepage: <http://jatim.bps.go.id>.
E-mail: bps3500@bps.go.id

ISBN 978-602-6756-62-6



9 786026 756626